



**IMPLEMENTASI PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT*
TERHADAP USAHA BUMDES TUMPANG KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

SANDI WIRANATA

NPM 219.01.09.1.014



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2023

Ringkasan

Sandi Wiranata. 2023. Implementasi Program One Village One Product Terhadap Usaha Bumdes Tumpang Kabupaten Blitar. Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si. Septina Dwi Rahmawati, S.AP.,M.AP. 131 Halaman + xv.

Implementasi program OVOP pada BUMDes Tumpang sesuai dengan SK Bupati No 188 Tahun 2022 dengan potensi yang melimpah yaitu pertanian pisang *cavendish*, peternakan kambing, cafe selo angon. Masalah utama yang dihadapi terkait manajemen SDM dan pemasaran produk. Keterlibatan partai politik dan *political will* dari bupati. Penelitian ini menggunakan teori utama implementasi kebijakan dari George Edwards III, yang menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada implementasi OVOP oleh Dinas PMD dan dampak yang diterima pada BUMDes Tumpang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam proses komunikasi yang berjalan kurang komunikatif, dengan sumber daya yang cukup dengan melibatkan *stakeholders*, kemudian disposisi Bupati Blitar yang masih *political will*, dan struktur birokrasi yang panjang dan melibatkan orang partai politik serta manajemen yang kurang baik. Hal tersebut membuat implementasi OVOP kurang berjalan secara maksimal dan tidak adanya keberlanjutan. Dampak usaha yang diterima oleh BUMDes Tumpang justru mengalami penurunan seperti divisi pertanian pisang *cavendish* yang tutup, dan pemasaran peternakan berkurang. Hal tersebut karena tidak adanya monitoring, bantuan, dan pembinaan dari Dinas PMD setelah program OVOP. Kesimpulan penelitian adalah implementasi OVOP jika dilihat berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edwards III, keempat indikator sudah terpenuhi namun masih belum berjalan secara maksimal, karena sikap atau disposisi Bupati Blitar dalam OVOP berupa *political will* dan rawan dengan konflik kepentingan. Sehingga dampak usaha pada BUMDes Tumpang justru mengalami penurunan dan potensi tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Saran yang diberikan peneliti yaitu pemerintah daerah membuat peraturan jelas terkait buku pedoman pelaksanaan, sehingga koordinasi dan komunikasi lebih maksimal, dan Dinas PMD lebih aktif untuk sosialisasi dengan masyarakat Desa Tumpang.

Kata Kunci: Implementasi, Program *One Village One Product*, BUMDes

Summary

Sandi Wiranata. 2023. *Implementation of the One Village One Product Program for Bumdes Overlapping Businesses in Blitar Regency*. Dr. H. Slamet Muchsin, M.M. Septina Dwi Rahmawati, S.AP.,M.AP. 131 Pages + xv.

The implementation of the OVOP program for BUMDes Overlapping is by Regent Decree No. 188 of 2022 with abundant potential, namely cavendish banana farming, goat farming, Selo Angon cafe. The main problems faced are related to HR management and product marketing. Involvement of political parties and political will from the regent. This study uses the main theory of policy implementation from George Edwards III, which explains that there are 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive with a qualitative approach, which focuses on the implementation of OVOP by the PMD Office and the impact it has received on BUMDes Tumpang. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. As well as test the validity of the data with source triangulation. The results of the research found that in the communication process that runs less communicative, with sufficient resources involving stakeholders, then the disposition of the Blitar Regent is still political will, and the bureaucratic structure is long and involves people from political parties and management is not good. This makes OVOP implementation less optimal and there is no sustainability. The business impact received by BUMDes Tumpang has decreased, such as the cavendish banana farming division which closed, and livestock marketing decreased. This is because there is no monitoring, assistance, and coaching from the PMD Office after the OVOP program. The conclusion of the research is the implementation of OVOP when viewed based on George Edwards III's policy implementation theory, the four indicators have been fulfilled but are still not running optimally, because the attitude or disposition of the Blitar Regent in OVOP is political will and prone to conflicts of interest. So the business impact on the Overlapping BUMDes has decreased and the potential cannot be developed optimally. The advice given by the researchers is that the local government makes concrete regulations related to the implementation guidebook, so that coordination and communication are maximized, and the PMD Service is more active in outreach to the people of Tumpang Village.

Keywords: *Implementation, One Village One Product Program, BUMDes*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lebih dari 77 tahun yang lalu, para pendiri Bangsa Indonesia sudah memikirkan bagaimana melindungi, memajukan, dan mensejahterakan rakyat Indonesia melalui kedaulatan dalam bidang ekonomi. Melalui konsepsi ekonomi kerakyatan yang tidak bisa dilepaskan dari konstitusi negara Pasal 33 UUD Tahun 1945. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah amanah bagi penyelenggara negara Republik Indonesia untuk mewujudkannya. Pemerintah kemudian menyusun kebijakan yang dianggap tepat dan sesuai. Mengelola ekonomi sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik.

Untuk mengimplementasikan konstitusi tersebut Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi program *One Village One Product* (OVOP). OVOP awal mulanya dirintis dan dikembangkan di Jepang oleh ilmuwan bernama Prof. Morihiko Hiramitsu yang saat itu juga menjabat sebagai Gubernur Prefektur Oita, Jepang pada tahun 1980. Konsep yang digagasnya berkembang dan menyebar ke berbagai negara termasuk di negara-negara ASEAN di antaranya adalah Negara Malaysia, Philipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Serta juga diadopsi di beberapa negara di Benua Asia Selatan, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Selatan (<http://ikm.kemenperin.go.id/>,n.d). Berdasarkan artikel yang dimuat dalam website Kemenperin bahwa OVOP merupakan program yang terpercaya dan unggulan yang bisa meningkatkan

kualitas dari usaha kecil suatu daerah sehingga penerapannya bisa berkembang di beberapa negara berkembang.

Kebijakan OVOP sendiri sudah sangat sukses diterapkan di negara asalnya Jepang terkhusus di Prefektur Oita dengan menghasilkan berbagai produk unggulan salah satunya jamur *shitake*. Kebijakan tersebut membuat Jepang menjadi negara industri yang besar dan menempati peringkat ketiga perekonomian besar dunia di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok. Tujuan dari program OVOP yaitu untuk menggali dan mempromosikan produk yang inovatif dan kreatif yang ada di daerah. Program ini dinilai cocok untuk dikembangkan di negara berkembang karena bisa memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi desa agar dapat bersaing di pasar nasional hingga pasar internasional.

Dari program ini nantinya akan memberikan kontribusi pendapatan untuk masyarakat maupun daerah. Menurut Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (<http://ikm.kemenperin.go.id/>, n.d) :

“OVOP di Indonesia umumnya adalah UKM yang konsisten dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan BUMN dan terus mendapatkan bimbingan serta aneka bantuan dari pemerintah, hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan mewakili identitas daerah bahkan negara, di mana produknya mencerminkan keunikan suatu daerah.”

Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas, di mana mayoritas atau sekitar 65% penduduknya masih tergolong miskin, berpendapatan rendah, dan mayoritas desa-desa tersebut perlu untuk dikembangkan. Melihat betapa besarnya potensi daerah di Indonesia

Pemerintah telah menerbitkan peraturan melalui Kementerian Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk untuk implementasi program OVOP di daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Industri Kecil Menengah melalui pendekatan OVOP.

Pengembangan program OVOP di Indonesia sangat cocok diterapkan oleh Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan jenis usaha paling besar dan banyak di Indonesia. Di Indonesia program OVOP mulai berjalan sejak tahun 2008 melalui Kementerian Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) awalnya pada sektor kerajinan. Saat ini program OVOP sudah diterapkan di berbagai daerah, salah satunya di Jawa Timur. Program ini dinilai cocok untuk diimplementasikan di daerah-daerah, untuk meningkatkan potensi produk daerah sehingga dapat bersaing di pasar nasional maupun Internasional. Pengembangan BUMDes melalui program OVOP sangat memerlukan dukungan pemerintah, *stakeholder*, dan sumber daya manusia yang baik agar dapat menciptakan produk unggulan yang berkualitas.

Pada beberapa desa di Indonesia BUMDes di naungi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa yang memiliki peran untuk pengelolaan potensi ekonomi yang ada di desa dengan mngutamakan pemberdayaan ekonomi BUMDes dan meningkatkan pendapatan desa. Pembentukan BUMDes ini kemudian diatur dalam UU No 32

Tahun 2004. BUMDes sangat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan berbagai ciri khas dan potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Oleh karena itu program OVOP sangat cocok untuk diterapkan pada BUMDes. Menurut Muchsin (2017), dalam ekowisata dan pengembangan ekonomi daerah juga melibatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaannya sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Sesuai dengan yang termuat Permendes No 4 Tahun 2015 BUMDes memiliki peranan utama yaitu Penyediaan atau peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa, pemanfaatan aset desa dan pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh Rahmawati (2018), peran serta masyarakat dalam memelihara budaya, kemandirian, dan kecerdasan dalam pemanfaatan teknologi akan memberikan andil besar bagi wisata dan perekonomian. Kemudian data yang diambil dari Kementerian Desa pada tahun 2014, BUMDes di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat yaitu terdiri dari 1.022 unit dan kemudian pada tahun 2020 berkembang menjadi 51 ribu unit BUMDes. Data diatas menunjukkan peningkatan BUMDes di Indonesia sangatlah pesat mencapai 65%. Perkembangannya tentu akan berbeda-beda di setiap daerah, salah satunya perkembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar.

Perkembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berdasarkan sumber (kliktimes.com, 2023) yaitu berjumlah 220

unit, jumlah tersebut sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten Blitar yang tersebar di 22 kecamatan. BUMDes sendiri terdiri dari empat kategori yaitu sehat, cukup sehat, tidak sehat, dan tidak aktif. Dari empat kategori tersebut hanya terdapat 83 BUMDes yang sehat. Untuk meningkatkan kualitas dari BUMDes terutama setelah pandemi covid-19, Bupati Blitar terpilih Rini Syarifah mulai untuk menerapkan program OVOP di Kabupaten Blitar dengan menggandeng *stakeholders*, OPD, dan BUMDes. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk implementasi program OVOP pada desa melalui BUMDes, Bupati berkunjung ke berbagai desa yang bertujuan untuk mengenalkan ke masyarakat desa dan pelaku BUMDes terkait dengan program OVOP yang dijalankan. Selain itu, untuk melihat kemampuan sumber daya yang terdapat pada desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa mulai dari pengelolaan produk, pemasaran, hingga permodalan usaha, permasalahan yang umum ditemukan pada BUMDes (Kominfo.jatimprov.go.id, 2022). Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Blitar dilakukan upaya dengan memberikan pendampingan dengan meningkatkan kolaborasi antar *stakeholders* dan mengupayakan berbagai kebutuhan BUMDes serta menginstruksikan kepada OPD terkait.

Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan *stakeholders* yang terlibat. Bupati Blitar juga menegaskan agar mengaktifkan Karang Taruna dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk turut serta berkontribusi dalam mengelola potensi yang ada di desa (ppid.blitarkab.go.id, 2022). Dari data berita

tersebut potensi yang ada di desa tidak hanya dengan produknya saja melainkan dengan sumber daya manusia yang harus dikembangkan dan diberdayakan untuk nantinya dapat menghasilkan produk BUMDes yang berkualitas.

Implementasi program OVOP juga diterapkan di Desa Tumpang yang memiliki beberapa unggulan.

“Desa Tumpang melahirkan beberapa produk seperti brownis, olahan kripik, kerajinan sepatu, jamur, olahan minuman, dan produk bumdes seperti pertanian, peternakan, dan cafe (mitratoday, 2022).”

Dengan banyaknya produk yang dimiliki para UMKM melalui BUMDes di Desa Tumpang, BUMDes Tumpang sendiri sudah memiliki badan hukum dengan nama resmi adalah PT. Selo Angun Makmur. Kemudian Bupati Blitar menyampaikan bahwa produk harus lebih menarik sehingga dapat menarik perhatian dan diminati oleh masyarakat luas. Bupati Blitar menambahkan kedepannya potensi yang ada di Desa Tumpang bisa dikembangkan dengan cara *study* tiru atau mengikuti pelatihan terkait dengan *branding*, *packaging*, dan promosi. Hadirnya program OVOP ini tentunya bisa memberikan solusi untuk para pelaku UMKM agar bisa berkembang dan mandiri untuk mencapai kesejahteraan khususnya di Desa Tumpang (skmoptimis.com, 2022).

Namun menurut pemaparan dari Mutiara Indah Permatasari, S.IP, bagian penguatan kelembagaan masyarakat Dinas PMD, ada faktor besar dalam implementasi program OVOP di Kabupaten Blitar, mengatakan bahwa:

“Program OVOP ini bukan usulan dari Dinas tapi sebenarnya adalah *political will* Bupati, jadi dalam pelaksanaannya tidak hanya soal ekonomi saja tapi juga masalah lain, karena ini bagian dari sambang desa Bupati

Blitar. Dalam pelaksanaannya memang tidak menentu tergantung dari jadwal Bupati (Wawancara, 08 juni 2023).”

Jadi memang dalam pelaksanaan program OVOP ini masih keinginan politik bupati sehingga tentunya ini juga berkaitan pada data yang disampaikan oleh kepala Dinas PMD masih banyak BUMDes yang masih dalam kategori cukup sehat, tidak sehat, dan tidak aktif. Untuk BUMDes PT. Selo Angon Makmur ini masuk dalam ketegori BUMDes yang tidak sehat. Meskipun kunjungan Bupati Blitar untuk menjalankan program OVOP di Desa Tumpang bermaksud untuk membantu para UMKM namun pada implementasinya tidak dapat berjalan secara baik. Hal ini juga didukung kembali oleh penjelasan Agus Salim, S.Ag, yaitu:

“Sebelumnya BUMDes di Tumpang memiliki banyak sektor usaha, seperti pertanian dan peternakan yang cukup maju sehingga mampu mendirikan PT. namun mulai tahun 2022 mulai banyak pengurangan sektor usaha, setelah adanya program OVOP juga tidak ada tindak lanjut yang signifikan seperti pelatihan, pendampingan, atau pengawasan dari OPD (Wawancara, 08 juni 2023).”

Masalah utama yang dihadapi oleh usaha BUMDes Tumpang adalah tidak adanya monitoring, pendampingan, dan bantuan serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BUMDes Tumpang dengan Dinas PMD. Sehingga dari masalah tersebut terdapat Gap Penelitian yang muncul dibandingkan implementasi program OVOP di daerah lain, yaitu:

1. *Political will* Bupati Blitar dan keterlibatan orang partai politik
2. Manajemen *internal* organisasi terkait sumber daya manusia
3. Pemasaran produk BUMDes Tumpang, pertanian dan peternakan

Dari gap penelitian tersebut sangat berpengaruh dalam proses implementasi program OVOP di Kabupaten Blitar. Peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian ini karena Kebijakan program OVOP merupakan salah satu program dari pemerintah pusat yang memiliki dampak besar terhadap kemajuan ekonomi negara dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, program OVOP ini sangat menarik untuk diteliti oleh peneliti khususnya di daerah Kabupaten Blitar tepatnya di BUMDes Tumpang yaitu PT. Selo Angon Makmur. Dengan melihat potensi yang ada dan BUMDes Tumpang yang sempat mengalami masa kejayaannya kemudian mengalami proses penurunan seperti saat ini. Lalu apakah program OVOP di Kabupaten Blitar memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Jika berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan program OVOP di BUMDes masih belum terlaksana dengan baik, karena berbagai faktor masalah seperti tidak ada tindak lanjut maupun koordinasi. Untuk menggali lebih dalam permasalahan yang terjadi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program OVOP yang dilaksanakan oleh Dinas PMD?
2. Bagaimana dampak program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi program OVOP yang dilaksanakan oleh Dinas PMD.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak program terhadap usaha dari BUMDes Tumpang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, serta dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang membahas soal implementasi program OVOP.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti, serta melatih daya berpikir kritis dan kepekaan peneliti terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat serta bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang implementasi program OVOP.

b. Bagi Universitas Islam Malang

Untuk menambah koleksi pustaka serta menjadi referensi bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik pada khususnya dan seluruh mahasiswa Universitas Islam Malang pada umumnya. Sebagai

bahan Universitas Islam Malang untuk menuju kampus yang lebih berkualitas berbasis pada riset dan penelitian dan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

c. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang pelayanan publik khususnya perekonomian desa berbasis UMKM Desa.

E. Sistematika Pembahasan

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian yaitu gambaran umum mengenai Implementasi *One Village One Product* (OVOP) terhadap produk unggulan BUMDes Tumpang. Selain itu juga menjabarkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat peneliti, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini merupakan pemaparan dan uraian teori sebagai tinjauan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga bisa digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah diperoleh peneliti di lapangan.

3. Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian sendiri terdiri dari jenis penelitian, fokus

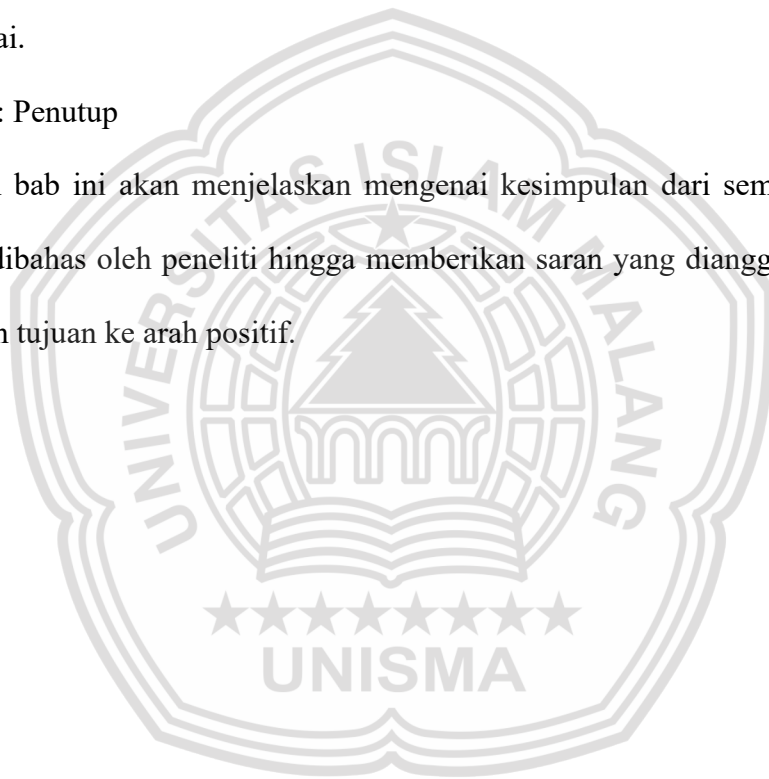
penelitian, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjabarkan tentang hasil pengolahan data dan menggambarkan masalah yang terjadi pada tahap analisis yang kemudian diinterpretasikan melalui teori yang terkait, sehingga tujuan peneliti dapat tercapai.

5. Bab V: Penutup

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari semua yang telah dibahas oleh peneliti hingga memberikan saran yang dianggap perlu dengan tujuan ke arah positif.



BAB. V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program OVOP terhadap BUMDes Tumpang di Kabupaten Blitar kemudian telah dilakukan pembahasan di atas dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edwards III (dalam Nugroho, 2011), yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari empat aspek maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi Program OVOP di Kabupaten Blitar

1) Komunikasi dalam program OVOP

Dalam komunikasi yang terjalin antara Dinas PMD dan BUMDes Tumpang masih kurang dan tidak komunikatif. Dalam komunikasi ada tiga indikator, yaitu:

- a) Transmisi, transmisi komunikasi cukup baik dengan alur pelaksanaan dari Dinas PMD melakukan survey dulu ke desa sasaran kemudian disampaikan ke *staff* bupati untuk menanyakan kesiapan bupati.
- b) Kejelasan, dalam aspek kejelasan petunjuk pelaksanaan program terdapat surat keputusan dari bupati yang isinya soal tim pelaksanaan OVOP. Program yang berjalan di Kabupaten Blitar hanya terdapat surat keputusan dan belum ada peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan.

c) Konsistensi, konsistensi dalam program OVOP merupakan *political will* Bupati Blitar karena dalam program OVOP tidak hanya membahas soal ekonomi saja melainkan juga permasalahan lainnya seperti jalan. Selain itu koordinasi dengan Bupati Blitar melalui stafnya yang merupakan orang partai politik bukan dari ASN sehingga dalam konsistensi memang masih kurang karena birokrasi konsistensi program OVOP masih belum maksimal.

2) Sumber Daya

Sumber daya hal yang mendukung dalam proses implementasi OVOP melibatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Staf, implementasi program OVOP melibatkan berbagai pihak yaitu OPD, penggiat masyarakat dan pemateri dalam pelatihan yang melibatkan orang dari luar. Dari sisi BUMDes staffnya masih kekurangan karena hanya ada badan pengurus harian.
- b) Informasi, informasi yang disampaikan pada desa sasaran dengan melakukan koordinasi kemudian desa akan menginformasikan pada peserta yang akan ikut yaitu dari karang taruna, kelompok masyarakat, UMKM dan BUMDes.
- c) Wewenang, wewenang berada pada bupati Blitar dan program ini sebagai *political will* sehingga memang belum maksimal

karena melibatkan orang partai politik juga dan hanya sekedar befokus pada kuantitas.

d) Fasilitas, fasilitas yang diberikan oleh Dinas PMD selama program OVOP berupa *sound system*, panggung, tenda, kursi, genset, makan minum, dll. Untuk penjualan produk BUMDes ada *platform e-catalog*.

3) Sikap atau Disposisi

Program OVOP yang berjalan di Kabupaten Blitar hanya sekedar *political will* Bupati sehingga memang belum maksimal dan terlambat karena OVOP sudah berlaku nasional pada tahun 2008. Selain itu staff bupati yang mengurus OVOP juga dari partai politik sehingga memang rawan konflik kepentingan dan BUMDes Tumpang yg menjadi sasaran tidak mengalami perbaikan tapi justru penurunan.

4) Struktur Birokrasi

Strukturnya berpedoman pada surat keputusan bupati tentang tim pelaksana OVOP. Dimana Dinas PMD sebagai sekretarisnya. Sedangkan pada BUMDes Tumpang strukturnya hanya terdiri dari badan pengurus harian dan komisaris.

b. Dampak Program OVOP ke BUMDes Tumpang

Pembinaan yang dilakukan pada BUMDes Tumpang diinisiasi oleh pemerintah desa sendiri dengan anggaran dari PADes. Dari dinas dalam melakukan bimbingan hanya berfokus pada manajemen keuangan dan

struktur BUMDes. Peranan dinas dalam melakukan pembimbingan pada BUMDes masih sangat kurang karena desa masih melakukan sendiri dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Permasalahan lainnya yaitu kurangnya monitoring sehingga permasalahan yang ada pada BUMDes Tumpang tidak segera teratasi. Setelah program OVOP berlangsung juga tidak ada tindak lanjut setelahnya jadi memang hanya program yang penting terlaksana saja, hal ini sesuai penjelasan komisaris BUMDes Tumpang bahwa program OVOP justru merepotkan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan sedemikian rupa, maka disini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar membuat konsep, atau peraturan yang detail terkait bagaimana pelaksanaan program OVOP yang didalamnya termuat pedoman program OVOP sehingga dari Dinas PMD dan BUMDes bisa mengetahui secara jelas program OVOP. Dengan adanya peraturan juga membuat program berjalan secara keberlanjutan.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dan komunikatif, antara BUMDes Tumpang dan OPD. Dengan struktur birokrasi yang pendek, seperti berikut ini:



Gambar 20. Alur Koordinasi Implementasi OVOP

(Sumber: Data diolah peneliti, 2023)

3. Terhadap BUMDes Tumpang jika terjadi permasalahan *internal* untuk lebih aktif dalam melakukan koordinasi dan mengkonsultasikan dengan Dinas PMD. Sehingga ketika terjadi permasalahan bisa diselesaikan bersama dengan harapan mendapatkan solusi dan bantuan dengan segera. Oleh karena itu dibutuhkan contact person yang khusus berkaitan dengan BUMDes pada Dinas PMD.
4. Masyarakat Desa Tumpang juga harus aktif dalam berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes Tumpang. maka dari itu dibutuhkan sosialisasi dari Dinas PMD sehingga masyarakat sadar dan mengerti, seperti:
 - a) Dinas PMD melakukan sosialisasi ke PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna atau Gapoktan.
 - b) Dinas PMD aktif memberikan edukasi terkait program OVOP melalui sosial media.
 - c) Dinas PMD bekerjasama dengan Desa Tumpang untuk membuat iuran rutin masyarakat sebagai bantuan modal pada BUMDes Tumpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Agustino Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Assauri. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Dwiyanto Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gulo. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Grasindo Anggota IKAPI.
- Herdiansyah. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indriantoro, Nur, Bambang S. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BFEE UGM.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2001). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunggono, (1994). *Hukum dan Kebijakan Pulik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Tersiana Andra. (2022). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Wahab Abdul, Solichin. (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

E-Book

Kementerian Perindustrian. (2010). Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pengembangan IKM melalui Program OVOP, Jakarta: Dirjen IKM Kementerian Perindustrian.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. Philippines: CO-TRAIN.

Skripsi dan Jurnal

Claymone, Jaiborisudhi. (2011). *A study on one village one product project (OVOP) in Japan and Thailand as an alternative of community development in Indonesia* (Jurnal Internasional). *The Internasional Journal of East Asian Studies*: Vol. 16 No. 1 2011.

Gita, Yuliana, Suprayitno. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendekatan OVOP (Skripsi). Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah. ISSN Vol. 2 No. 2, Desember 2021.

Kutsiyah Farahdilla. (2017). Performa Desa yang Diusulkan untuk Penerapan OVOP di Kabupaten Pamekasan (Skripsi). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. P-ISSN:2354-7057 Vol. 4 No.1 Juni 2017.

Murti, Harianto. (2019). Pendekatan OVOP Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa (Skripsi). Fakultas Teknologi Informasi Unmer Malang: ISSN 2598-0076.

Rahmawati, S. D. (2018). Educational Tourism on Screen (ETOS). Prosiding Semnasfi, 1(1), 234-239.

Ridwan, M. A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2017). Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 141-158.

Subiantoro Jhevanda. (2019). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Program OVOP Kendang Jimbe di Kota Blitar. Skripsi Administrasi Negara, Universitas Airlangga.

Wahyudi Aris. (2016). Efektivitas dan Efisiensi Implementasi OVOP dalam Pengembangan BUMDES Gerabah di Kasongan (Tesis). Tata Kelola Seni: Vol. 2 No.1 Juni 2016. Pasca ISI Jogja.

Website

Agtvnews.com. One Village One Product, upaya pemkab blitar dongkrak perekonomian warga (online). <https://www.agtvnews.com/plat-ag/pr-582403942/one-village-one-product-upaya-pemkab-blitar-dokrak-perekonomian-warga-bupati-manfaatkan-potensi>. Diakses pada 05 februari 2023.

- Blitar Optimis. Sumbang Desa Bupati Blitar Ke Kendalrejo dan Tumpang (online). <https://skmoptimis.com/sumbang-desa-bupati-blitar-ke-kendalrejo-dan-tumpang/>. Diakses pada 14 juni 2023.
- Desa Tumpang. Profil Desa Tumpang (online). <https://tumpang-talun.desa.id/>. Diakses pada 15 juni 2023.
- Dinas Koperasi dan UKM Jatim. Data UKM Jawa Timur (online). <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>. Diakses pada 05 februari 2023.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sosialisasi One Village One Product (online). <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6190>. Diakses pada 18 Januari 2023.
- Dirjen IKM. Program One Village One Product (online). <https://ikm.kemenperin.go.id/>. Diakses pada 18 Januari 2023.
- Hadi, F.M, 2023. Aplikasi Data Desa Center Bumdes di Blitar (online). <https://www.kliktimes.com/news/pr-7296944856/sesuai-aplikasi-data-desa-center-mayoritas-bumdes-di-blitar-masih-pemula>. Diakses pada 26 Desember 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2010). Pengertian dari Dampak (online). <https://kbbi.web.id/unggul>. Diakses pada 05 februari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian dari Komoditas (online). <https://kbbi.web.id/komoditas>. Diakses pada 01 februari 2023.
- Kementerian Perindustrian. <http://BUMDes.kemenperin.go.id/programmes/capacity-building/one-village-one-product-ovop/> (online). Diakses pada 20 desember 2022
- Kominfo.jatimpro.go.id. (2022). Bupati blitar dorong program OVOP tumbuhkan perekonomian desa (online). <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bupati-blitar-dorong-program-ovop-tumbuhkan-perekonomian-desa>. Diakses pada 05 februari 2023.
- OVOP Indonesia. (online). <https://ovop.kemenperin.go.id/>. Diakses pada 18 Januari 2023.
- Pemerintah Kabupaten Blitar. (2021). Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Blitar (online). <https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/#:~:text=Secara%20administratif%20Kabupaten%20Blitar%20terbagi,28%20kelurahan%20dan%20220%20desa>. Diakses pada 10 Januari 2023.
- Pemkab Blitar. (2022). Pemerintah blitar dukung perekonomian tingkat desa melalui program OVOP (online). <https://www.blitarkab.go.id/2022/10/06/pemkab-blitar-dukung->

perekonomian-di-tingkat-desa-melalui-program-ovop/. Diakses pada 28 desember 2022

Ppid.blitarkab.go.id, (2022). Bangkitkan perekonomian tingkat desa, gencar lakukan ovop (online). <https://ppid.blitarkab.go.id/2022/11/bangkitkan-perekonomian-tingkat-desa-pemkab-blitar-gencar-lakukan-program-ovop/>. Diakses pada 05 februari 2023.

Redaksi KPPN BKT. Dana Desa (online). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>. Diakses pada 26 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Tahun 1945 Pasal 33 sebagai Landasan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Industri Kecil Menengah melalui pendekatan OVOP.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/-IND/9/2007 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) di Sentra.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.